

PERAN PEMERINTAH DESA TEMIANG TERHADAP PENDIDIKAN SUKU LAUT DI PULAU SENANG KABUPATEN LINGGA

**Oleh
Rusiah
NIM. 2205040018**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Temiang dalam mendukung pendidikan masyarakat Suku Laut di Pulau Senang, Kabupaten Lingga. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pendidikan merupakan aspek penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun masyarakat Suku Laut menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pendidikan formal, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, lokasi sekolah yang jauh, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif-deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami peran pemerintah desa secara nyata, perilaku yang diharapkan, dan norma yang melekat pada kedudukan desa dalam konteks pendidikan masyarakat Suku Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Temiang telah berperan sebagai mediator, fasilitator, dan koordinator dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat Suku Laut, antara lain melalui penyediaan sarana transportasi laut berupa pompong, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemberian bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut selaras dengan perspektif teori peran Soerjono Soekanto, mencakup peran sebagai norma yang melekat pada kedudukan, perilaku yang diharapkan masyarakat, serta perilaku nyata dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, pelaksanaan program pendidikan masih menghadapi hambatan signifikan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, budaya hidup nomaden, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang terpencil dan sulit diakses. Hambatan-hambatan tersebut saling terkait dan memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan pendidikan masyarakat Suku Laut memerlukan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dengan strategi yang adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat. Rekomendasi yang muncul adalah perlunya kebijakan berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan akses pendidikan, serta meminimalkan keterbatasan geografis dan budaya dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pendidikan, Suku Laut.

**THE ROLE OF TEMIANG VILLAGE GOVERNMENT IN THE
EDUCATION OF THE SEA NOMAD (SUKU LAUT) COMMUNITY ON
PULAU SENANG, LINGGA REGENCY**

By

**Rusiah
NIM. 2205040018**

ABSTRACT

This study examines the role of the Temiang Village Government in supporting the education of the Sea Nomad (Suku Laut) community on Pulau Senang, Lingga Regency. As the smallest administrative unit, the village has the authority to manage governmental affairs and the interests of the local community based on Law Number 3 of 2024 concerning Villages. Education is a crucial aspect for improving human resource quality; however, the Suku Laut community faces various obstacles in accessing formal education, including limited facilities and infrastructure, distant school locations, and low awareness of the importance of education. This research employs a juridical-empirical approach with a qualitative-descriptive method, using observation, interviews, and documentation to understand the village government's role in practice, the behaviors expected by the community, and the norms attached to the village's position regarding education for the Suku Laut community. The findings indicate that the Temiang Village Government acts as a mediator, facilitator, and coordinator in providing educational access for the Suku Laut, including through the provision of sea transportation such as pompongs, the development of supporting infrastructure, and the distribution of social assistance and community empowerment programs. These roles align with Soerjono Soekanto's role theory, encompassing roles as norms attached to positions, behaviors expected by the community, and actual behaviors in social life. Nevertheless, the implementation of educational programs still faces significant challenges, such as low community awareness of education, nomadic lifestyle, limited facilities, and geographically isolated locations. These obstacles are interconnected and affect the effectiveness of village-level educational policies. The study concludes that improving education for the Suku Laut community requires synergy between the village government, the community, and other stakeholders, with strategies adapted to social, cultural, and geographical conditions. Recommendations include the need for sustainable, locally wisdom-based policies to encourage active community participation, enhance educational access, and minimize geographic and cultural barriers in the learning process.

Keywords: *Village Government, Education, Suku Laut.*